

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang dimaksudkan guna meneliti sejumlah data dan fakta yang diperoleh dari objek penelitian secara ilmiah, yakni penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan rasional dan empiris, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah (keilmuan).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang menurut Sugiyono (2017 : 2) yang dimaksud dengan metode penelitian adalah sebagai berikut : "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu."

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, (2014:2) pendekatan kualitatif yaitu "Data yang dikumpulkan cenderung bersifat naratif daripada angka-angka yang hasil analisisnya berupa uraian-uraian yang sangat deskriptif dan berdasarkan pada analisis data secara induktif".

Dengan demikian pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan menguraikannya secara deskriptif dan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Penelitian ini merupakan studi deskriptif analitis maka dalam memperoleh data yang sebanyak-banyaknya dilakukan melalui berbagai teknik yang disusun secara sistematis untuk mencari pengumpulan data hasil penelitian yang sempurna. Penulis melakukan penelitian dengan studi deskriptif karena sesuai dengan sifat masalah serta tujuan penelitian

yang ingin diperoleh yaitu mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam advokasi masyarakat desa Putrapinggian Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.

### **3.2 Operasionalisasi Konsep**

Menurut Ismail (2015:63) menyatakan bahwa : operasionalisasi konsep adalah proses untuk menurunkan konsep-konsep penelitian menjadi bagian-bagian supaya mudah dipahami dan dapat diukur. Setiap konsep penelitian perlu dicari definisi operasionalnya yaitu penjabaran konsep ke dalam bagian-bagian/ dimensi yang lebih rinci sehingga dapat diukur.

Dalam penelitian ini aspek konsep variabel yang akan diteliti yaitu mengenai Strategi Pembangunan Pariwisata Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Adapun aspek kajian dalam penelitian ini adalah untuk dapat meningkatkan potensi pariwisatanya, yang perlu dilakukan adalah strategi pengembangan wisata agar dapat lebih baik dari sebelumnya. Adapun konsep strategi pengembangan wisata menurut M. Liga Suryadana dalam Putra (2019:18) sebagai berikut:

1. Daya Tarik, dengan indikator-indikator:
  - a) Obyek wisata mempunyai sesuatu yang bisa dipertontonkan kepada wisatawan.
  - b) Mempunyai tempat atau shelter sebagai tempat rilek wisata Ketika berkunjung.

- c) Mempunyai fasilitas atau pusat berbelanja sebagai ciri khas atau icon untuk dijadikan oleh-oleh.
2. Aksesibilitas, dengan indikator-indikator
    - a) Akses jalan yang memadai
    - b) Adanya system telekomunikasi
    - c) Transportasi
    - d) Pos Pelayanan dan pusat informasi
  3. Fasilitas, dengan indikator-indikator:
    - a) Adanya Hotel, Penginapan, Villa dan Restoran
    - b) Adanya kamar mandi atau WC umum sebagai saran penunjang kebutuhan.
    - c) Memiliki kawasan parkir yang luas dan muat untuk banyak kendaraan.
  4. Lembaga Pengelola, dengan indikator-indikator:
    - a) Pihak Pemerintah atau Dinas Pariwisata mengalokasikan dan untuk pengembangan pariwisata.
    - b) Adanya dukungan dari pihak swasta terhadap pengembangan obyek wisata karangnini.
    - c) Adanya investor dari luar sebagai bentuk dukungan pengembangan wisata.

### **3.3 Data dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Data**

Menurut Arikunto (2015:158), menyatakan bahwa Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka,

matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni berupa ungkapan, kata-kata, dan kalimat. Selanjutnya, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Supranto (2012:120) bahwa : “Data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti”. Selanjutnya Supranto (2012:120) menyatakan bahwa : ”Data sekunder adalah data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian”.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran dan tokoh masyarakat yang dilakukan melalui observasi dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

### **3.3.2 Sumber Data**

Menurut Moleong (2014:145) sumber data adalah “Segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang masalah penelitian”. Lebih lanjut Moleong (2014:147) menjelaskan bahwa : “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Dari sumber data itu memperoleh keterangan yang berguna untuk mendukung proses deskripsi dan analisa masalah penelitian.

Adapun sumber data yang dipakai oleh peneliti untuk melengkapi data tersebut berasal dari informan sebagai berikut.

- a. Informan yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, (Moleong, 2014:132).

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah :

1. Kepala Dinas Pariwisata 1 orang
2. Ketua Dan Anggota Bidang Kepariwisata sebanyak 4 orang
3. Perwakilan masyarakat 3 orang

Dengan demikian maka peneliti mengambil sumber data sebanyak 8 orang.

- b. Dokumen

Pada umumnya data yang tercantum dalam berbagai jenis dokumen itu merupakan satu-satunya alat untuk mempelajari permasalahan tertentu, adapun dokumen yang dipakai oleh peneliti yaitu berupa tulisan atau catatan transkrip, buku, brosur, laporan, artikel, majalah dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Maksudnya untuk mengetahui serta data yang terkait dengan fokus penelitian.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2017:72) yaitu : "Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data".

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan pada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran dan tokoh masyarakat untuk mengetahui Strategi Pembangunan Oyek Wisata Karangnini Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

## 2. Observasi

Menurut Riduwan (2014 : 104), menyatakan bahwa : "[Observasi](#) merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan".

Dengan demikian observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mendatangi Dinas Pariwisata untuk mengamati Strategi Pembangunan Obyek Wisata Karangnini.

## 3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2015:158) "Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya.

Selanjutnya Sugiyono, (2017: 71) mengemukakan bahwa : "Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel (dapat dipercaya) kalau didukung oleh dokumen yang telah ada".

Dalam penelitian ini dokumentasi yang akan disajikan berupa pengambilan gambar (foto) dari narasumber.

### **3.5 Teknik Pengolahan/Analisis Data**

Moleong (2014:64), mendefinisikan analisis data sebagai berikut : Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) yang di sarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitik beratkan pada pengorganisasian data sedangkan yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.

Langkah-langkah analisis data menurut Moleong, (2014:69), adalah sebagai berikut:

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentrasformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi suatu kategori tertentu. Dalam proses ini, data diklasifikasikan menjadi tema-tema inti.

## 3. Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam penelitian ini, keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Moleong, (2013:70) menyatakan bahwa teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan sumber lainnya. Seperti yang dikutip oleh Moleong, membedakan empat macam triangulasi yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara terus menerus sejak saat kegiatan pengumpulan data di lapangan sampai selesai pengumpulan data secara keseluruhan.

### 3.6 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Obyek Wisata Karangnini Dan Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran. Lamanya penelitian yang penulis lakukan direncanakan kurang lebih 8 bulan, terhitung mulai bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Mei 2022, mulai dari tahap penjajagan, pelaksanaan penelitian sampai pada sidang skripsi. Untuk lebih jelasnya penulis sampaikan matrik jadwal kegiatan sebagai berikut :

**TABEL 3.1**  
**JADWAL DAN WAKTU PENELITIAN**  
**BULAN OKTOBER 2021 SAMPAI BULAN MEI 2022**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan													
		Tahun 2021			Tahun 2022										
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop
1.	Penjajagan														
2.	Studi Kepustakaan														
3.	Seminar out line														
4.	Penelitian														
5.	Penyusunan Skripsi														
6.	Sidang Skripsi														

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten**

###### **Pangandaran**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah beralamat di Jl. Kidang Pananjung No. 03 Telp. (0265) 631156 Pangandaran 46395.

Visi Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yaitu :

“Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2022, sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani.

Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang prima. Menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang professional dan sistem modern berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Mewujudkan penataan ruangan yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.

Dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan dalam penataan lingkungan melalui pembangunan dengan mempertimbangkan kelestarian alam serta memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Pembudidayaan kawasan diarahkan untuk tetap menjaga keseimbangan ekologis guna terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

### 3. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas

Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga Kabupaten Pangandaran melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas. Infrastruktur mencakup jaringan jalan, saluran air dan saluran pembuangan limbah, dan lain-lain yang memenuhi standar tinggi sebagai dukungan langsung terhadap terciptanya kawasan wisata yang berkelas dunia. Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk membuka wilayah-wilayah baru, untuk menghubungkan antara objek wisata serta untuk menyediakan jalan alternatif bagi jalan yang sudah ada. Untuk memenuhi standar kualitas yang mampu mewujudkan kepariwisataan berkelas dunia, sudah barang tentu diperlukan dukungan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna membentuk sistem infrastruktur yang cerdas. Terciptanya sistem infrastruktur cerdas, sistem pemerintah cerdas, sistem ekonomi cerdas, sistem masyarakat cerdas, sistem hidup cerdas serta sistem lingkungan cerdas diharapkan bersama-sama akan mewujudkan Pangandaran Kabupaten Cerdas.

### 4. Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal

Dimaksudkan untuk melestarikan tradisi dan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal merupakan warisan budaya yang terbentuk melalui proses interaksi antar manusia dan manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai

kebutuhan yang dipengaruhi oleh pandangan, sikap dan perilaku. Nilai-nilai kearifan lokal berorientasi pada keseimbangan, kelestarian, dan harmoni manusia, alam, dan budaya. Dalam era globalisasi saat ini, banyak ditemui ancaman global yang akan berdampak terhadap krisis nilai-nilai kearifan lokal, sehingga upaya-upaya penguatan ketahanannya perlu dilakukan.

5. Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.

Dimaksudkan untuk mewujudkan warga Kabupaten Pangandaran yang sehat, cerdas dan berbudaya yang bercirikan meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga dan lain-lain. Melalui misi ini warga Kabupaten Pangandaran juga dibangun untuk mempunyai keahlian, profesional, produktif dan mandiri serta dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya sehingga mampu menangkap kesempatan kerja dan atau mengembangkan kewirausahaan sehingga dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran dan juga diarahkan untuk terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia dan mampu bersaing di era globalisasi.

6. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), mewujudkan pariwisata yang berdaya

saing dan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan, serta mengembangkan sistem pembiayaan daerah terpadu.

Melihat Visi dan Misi yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai suatu peran yang cukup penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut. Oleh sebab itu, perlu analisa yang tepat untuk melihat apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar mengetahui strategi yang tepat untuk diterapkan.

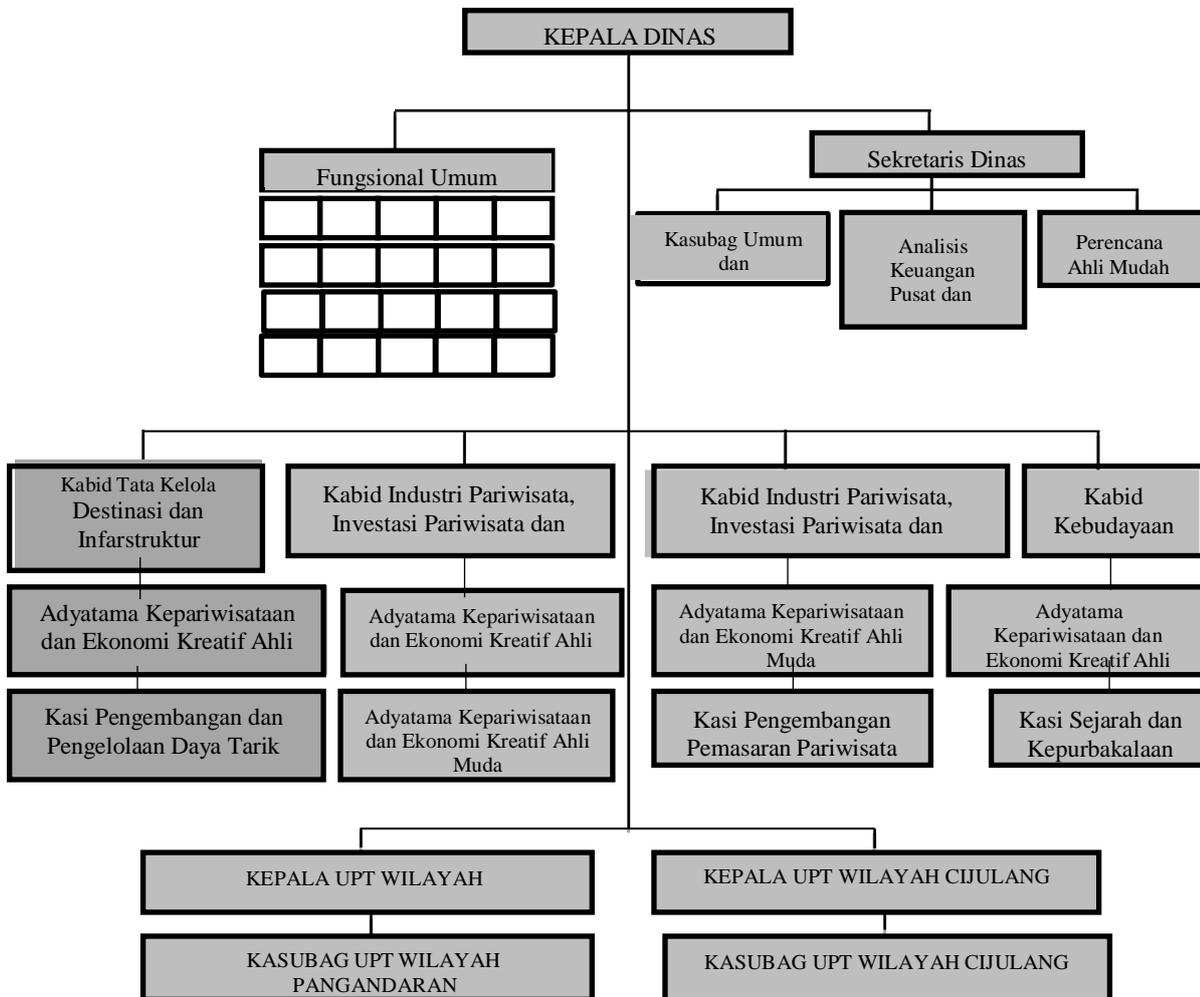
Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mendapatkan amanah untuk menjalankan Misi 1,4 dan 6 yaitu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani; Memperkuat Ketahanan Nilai–Nilai Kearifan Lokal; serta Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran**

Struktur organisasi merupakan elemen penting yang sangat menentukan dalam menjalankan aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan dasar kerjasama yang mempunyai bentuk atau susunan yang jelas dalam tiap-tiap tugasnya serta untuk menegaskan hubungan satu sama lain. Secara umum organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah kerangka tugas termasuk pelaksana-pelaksananya yang disusun demi mencapai tujuan umumnya. Organisasi dapat digambarkan dalam bentuk bagan yang disebut struktur organisasi, jadi struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memperagakan kelompok-kelompok

pekerjaan atau tugas-tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta kaitannya dengan pengaturan sumber daya manusia atau tenaga kerja agar tugas-tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik. Untuk lebih memperjelas mengenai struktur organisasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

**GAMBAR 4.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN**  
**KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN**



(Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2022)

### **4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran**

Selanjutnya mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diatur dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yaitu sebagai berikut :

#### **1. Kepala Dinas**

- (1) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan dalam rangka membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional Bidang Pariwisata dan Kebudayaan serta ekonomi kreatif sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;

- b. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, Bidang Pariwisata dan Kebudayaan serta ekonomi kreatif;
  - c. Penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Dinas;
  - d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
  - e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
- a. Mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Kebudayaan serta ekonomi kreatif;
  - b. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Mengkoordinasikan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
  - d. Memimpin, mengatur, membina, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
  - e. Menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;

- f. Menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup bidang Pariwisata dan Kebudayaan serta ekonomi kreatif;
- g. Menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang Pariwisata dan Kebudayaan serta ekonomi kreatif;
- h. Mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
- i. Menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
- j. Menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
- k. Memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
- l. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja dinas;
- m. Membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- o. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;

- p. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  - q. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas dinas; dan
  - r. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Kepala Dinas membawahkan :
- a. Sekretariat, yang membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Program;
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisata, yang membawahkan :
    - 1. Seksi Informasi dan Data Kepariwisata;
    - 2. Seksi Pengelolaan Destinasi Kepariwisata.
  - c. Bidang Kebudayaan, yang membawahkan :
    - 1. Seksi Seni dan Budaya;
    - 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
  - d. Bidang Ekonomi Kreatif, yang membawahkan :
    - 1. Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepariwisata;
    - 2. Seksi Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

e. Bidang Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Pemasaran, yang membawahkan :

1. Seksi Promosi Kepariwisata;
2. Seksi Pembinaan Usaha Kepariwisata.

## **2. Sekretariat**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan yang meliputi pelayanan kepegawaian dan umum, keuangan serta program yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
  - b. Pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
  - c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
  - d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - e. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Sekretaris mempunyai uraian tugas:
- a. Koordinasi kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas sesuai peraturan yang berlaku;
  - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - d. Pengelolaan barang milik/kekayaan/aset daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas sesuai peraturan yang berlaku;
  - e. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dinas sesuai peraturan yang berlaku;
  - f. Mengelola administrasi keuangan pada dinas sesuai peraturan yang berlaku;
  - g. Mengelola ketatausahaan, kearsipan dan rumah tangga dinas untuk kelancaran pelaksanaan dinas;
  - h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, keprotokolan dan rumah tangga;
  - i. Mengelola urusan keprotokolan dan humas untuk kelancaran tugas dinas;
  - j. Mengelola urusan kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku;

- k. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen evaluasi kinerja sesuai peraturan yang ada; dan
  - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Sekretariat membawahkan :
- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
  - c. Kepala Sub Bagian Program.

### **3. Bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisata**

- (1) Bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan perencanaan, pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Destinasi Kepariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisata mempunyai fungsi:
- a. Perumusan petunjuk teknis fasilitas pengembangan Promosi Daya Tarik Wisata dan Atraksi;
  - b. Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
  - c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisata.

- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisata mempunyai uraian tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisata berdasarkan kebijakan di Dinas;
  - b. Mengkoordinasi para Kepala Seksi dalam pelaksanaan program Pengelolaan Destinasi Kepariwisata;
  - c. Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahannya dalam pelaksanaan tugas sub bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisata sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  - d. Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahannya dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karier;
  - e. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisata membawahkan:
- a. Seksi Informasi dan Data Kepariwisata;
  - b. Seksi Pengelolaan Destinasi Kepariwisata.

#### **4. Bidang Kebudayaan**

- (1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengelolaan dan penyelenggaraan Bidang Kebudayaan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Kebudayaan, meliputi peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, Seni dan Budaya;
- b. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Kebudayaan, meliputi Seni dan Budaya serta Sejarah dan Kepurbakalaan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Kebudayaan

(3) Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai uraian tugas:

- a. Perencanaan Inventarisasi kebudayaan di daerah, tradisi masyarakat, tempat sejarah dan juru kunci;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas di bidang kebudayaan;
- c. Penggalian kebudayaan daerah dan tradisi daerah;
- d. Fasilitasi layanan kebudayaan yang meliputi Cagar Budaya dan Permuseuman, Sejarah dan Nilai Budaya serta Pembinaan Kesenian;
- e. Penggalian/penumbuhkembangan dan pelestarian kebudayaan daerah;
- f. Penyiapan bahan-bahan pembinaan yang berkaitan dengan kebudayaan daerah;

- g. Pengkajian, Penelitian dan Pemeliharaan benda koleksi Cagar Budaya, Sejarah, Permuseuman dan Nilai Budaya;
- h. Penyelenggaraan kerjasama dengan instansi terkait yang menangani kebudayaan dan tradisi masyarakat;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pertunjukan dibidang kebudayaan;
- j. Penyelenggaraan pagelaran yang berkaitan dengan kebudayaan, tradisi masyarakat dan karya seni/kesenian;
- k. Fasilitasi terbentuknya organisasi budayawan;
- l. Pemberian insentif kepada pengelola benda peninggalan sejarah;
- m. Penyusunan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi sejarah yang berkaitan dengan peninggalan purbakala, legenda rakyat, religi dan tradisi;
- n. Pengadaan kerjasama dengan instansi terkait untuk mengembangkan potensi peninggalan purbakala, legenda rakyat, religi dan tradisi sebagai komoditi usaha wisata;
- o. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Kebudayaan, membawahkan:

- a. Seksi Seni dan Budaya;
- b. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.

## **5. Bidang Ekonomi Kreatif**

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengelolaan dan penyelenggaraan Bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis sarana usaha, produksi dan kerjasama;
  - b. Pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan sarana usaha, produksi, kerjasama antar lembaga serta pemantauan dan evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas:
  - a. Menyusun rencana kegiatan bidang ekonomi kreatif berdasarkan kebijakan di Dinas;
  - b. Mengkoordinasi para Kepala Seksi dalam pelaksanaan bidang ekonomi kreatif;
  - c. Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan dalam pelaksanaan tugas sub bidang ekonomi kreatif sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  - d. Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahannya dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karier;

- e. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan:
- a. Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepariwisata;
  - b. Seksi Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

#### **6. Bidang Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Pemasaran**

- (1) Bidang Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengelolaan dan penyelenggaraan Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Pemasaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Pemasaran mempunyai fungsi:
- a. Melaksanakan perumusan petunjuk teknis Usaha Kepariwisata dan Pemasaran;
  - b. Penyusunan bahan Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Pemasaran.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Bidang Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Pemasaran mempunyai uraian tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan bidang Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Pemasaran berdasarkan kebijakan di Dinas;
  - b. Mengkoordinasi para kepala seksi dalam pelaksanaan bidang pemasaran pariwisata;

- c. Memberi petunjuk kepala kepala seksi dan bawahan dalam pelaksanaan tugas sub bidang Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Pemasaran sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  - d. Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja kepala seksi dan bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karier;
  - e. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Pemasaran, membawahkan:
- a. Seksi Promosi Kepariwisata;
  - b. Seksi Pembinaan Usaha Kepariwisata.

#### **4.1.4 Keadaan Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran**

Keberadaan pegawai adalah merupakan unsur yang sangat penting bagi suatu organisasi karena pegawai adalah sebagai pelaksana dari segala aktivitas organisasi, sehingga tanpa adanya pegawai mustahil organisasi itu ada.

Untuk mengetahui keadaan pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran berdasarkan usia sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini :

**TABEL 4.1**

**KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN USIA DI DINAS**

**PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN**

<b>No</b>	<b>Tingkat Usia Pegawai/Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1	20 – 28	1 orang
2	29 – 36	3 orang
3	37 – 44	2 orang
4	45 – 52	11 orang
5	53 – 60	12 orang
	Jumlah	29 orang

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2022

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai usia diantara 53-60 tahun sebanyak 12 orang dan yang lainnya 45-52 sebanyak 11 orang, usia diantara 37-44 tahun sebanyak 2 orang, usia 29-36 sebanyak 3 orang serta sisanya usia 20-28 tahun sebanyak 1 orang. Berdasarkan tabel tersebut maka sebagian besar pegawai sudah senior dan mempunyai pengalaman serta sudah mengetahui terhadap penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran dengan baik.

Selanjutnya berikut penulis sampaikan keadaan pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran berdasarkan status kepegawaian, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini :

**TABEL 4.2**

**KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN DI  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
PANGANDARAN**

<b>No</b>	<b>Status Pegawai</b>	<b>Jumlah</b>
1	ASN	10 orang
2	NON ASN (P3K)	5 orang
3	HONORER	14 orang
	Jumlah	29 orang

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2022

Berdasarkan tabel tersebut maka sebagian besar pegawai berstatus honorer, sehingga masih perlu ditingkatkan lagi mengenai kebijakan dari pemerintah daerah tentang status kepegawaian di Dinas Pariwisata sehingga akan meningkatkan kinerja para pegawainya.

Selanjutnya berikut penulis sampaikan keadaan pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini :

**TABEL 4.3**  
**KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**  
**TERAKHIR DI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PANGANDARAN**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	3
2.	Sarjana ( S1 )	12
3.	Sarjana Muda/Diploma/Sederajat	-
4.	SMA/Sederajat	14
Jumlah		29

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2022 Dilihat

dari tingkat Pendidikan, pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran paling banyak adalah berlatar belakang pendidikan SMA/ sederajat yaitu 14 orang. Dengan demikian masih perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan cara peningkatan jenjang Pendidikan. berdasarkan tabel tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya tingkat Pendidikan pegawai yang berbeda diharapkan dapat saling mengisi kekurangan dari masing-masing pegawai sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

Untuk mengetahui keadaan pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran berdasarkan Golongan/Ruang berikut penulis sampaikan pada tabel di bawah ini :

**TABEL 4.4**  
**KEADAAN DAN JUMLAH PEGAWAI DINAS PARIWISATA**  
**DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN**  
**BERDASARKAN GOLONGAN/RUANG**

No	Golongan/Ruang	Jumlah
1.	IV/c	-
2.	IV/b	1
3.	IV/a	11
4.	III/d	-
5.	III/c	-
6.	III/b	5
7.	III/a	5
8.	II/d	-
9.	II/c	-
10.	II/b	1
11.	II/a	6
12.	I/d	-
13.	I/c	-
14.	I/b	-
15	I/a	-
Jumlah		29

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2022

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa keadaan pegawai berdasarkan pangkat dan golongan yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Pangandaran cukup memadai dengan tugas dan kewenangan yang ada pada sebuah organisasi. Adapun pegawai dengan pangkat paling tinggi yaitu Kepala Dinas dengan golongan IV/b sebanyak 1 orang dan pegawai yang paling rendah pangkat dan golongannya yaitu II/a sebanyak 6 orang. Dengan demikian, keadaan tersebut sangat menunjang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan, hal ini dikarenakan pegawai yang bekerja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran telah memiliki pengalaman.

Selanjutnya berikut penulis sampaikan keadaan pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini :

**TABEL 4.5**  
**KEADAAN DAN JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS**  
**KELAMIN DI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PANGANDARAN**

<b>No.</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Laki-laki	20
2.	Wanita	9
J u m l a h		29

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa keadaan dan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin pada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran didominasi oleh pegawai laki-laki dengan jumlah 20 orang. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dengan banyaknya pegawai laki-

laki diharapkan dapat lebih optimal dalam mengerjakan pekerjaannya dan dapat lebih memberikan contoh yang baik dalam menyelesaikan pekerjaan.

#### **4.1.5 Karakteristik Informan berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir**

Data karakteristik informan dalam penelitian ini mencakup data informan menurut umur, jenis kelamin dan pendidikan terakhir. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka karakteristik informan dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **4.1.5.1 Karakteristik informan berdasarkan Usia/Umur**

Karakteristik informan yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat berdasarkan usia/umur adalah sebagai berikut:

**TABEL 4.6**  
**KARAKTERISTIK INFORMAN BERDASARKAN USIA/UMUR**  
**TAHUN 2022**

<b>No</b>	<b>Umur</b>	<b>Jumlah</b>
1	25- 30 Tahun	-
2	31 -40 Tahun	4
3	41 -50 Tahun	4
	Total	8

Sumber : Instrumen Penelitian, 2022

Dari tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa usia informan tergolong dalam usia produktif yang masih mampu untuk mengembangkan kreatifitasnya dan masih mempunyai semangat yang tinggi sehingga diharapkan dapat memberikan

informasi kepada peneliti terkait Pengembangan Obyek Wisata Karangnini oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

#### 4.1.5.2 Jenis Kelamin

Selanjutnya jenis kelamin informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 4.7**  
**KARAKTERISTIK INFORMAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN**  
**TAHUN 2022**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	6
2	Perempuan	2
	Total	8

Sumber : Hasil wawancara, 2022

Dari tabel 4.6 di atas, dapat diketahui keadaan informan dalam penelitian ini terdiri dari laki-laki dan perempuan sehingga informan dapat saling mengisi dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti terkait dengan pengembangan obyek wisata karangnini oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

#### 4.1.5.3 Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui pendidikan terakhir informan dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 4.8**  
**KARAKTERISTIK INFORMAN BERDASARKAN**  
**PENDIDIKAN TERAKHIR**  
**TAHUN 2022**

No	Tiagkat Pendidikan	Jumlah
1	SI	5
2	SLTA	3
	Jumlah	8

Sumber : Hasil wawancara, 2022

Dari tabel 4.7 di atas, dapat diketahui bahwa keadaan informan jika dilihat dari tingkat penddiikan sudah memadai sehingga informan dapat memberikan informasi kepada peneliti terkait Pengembangan Obyek Wisata Karangnini oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

#### **4.2 Pembahasan**

Kepariwisataan merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki peran penting bagi suatu negara di dunia. Hal tersebut dikarenakan sektor kepariwisataan memberikan sumbangan yang cukup besar pada penghasilan nasional dalam suatu negara oleh karena itu hasil kegiatan para pelancong yang berkunjung ditempat wisata. Selain itu daerah kepariwisataan mampu meningkatkan serta memacu kegiatan pembangunan dalam suatu negara, membuat lapangan kerja, membuka lapangan usaha baru serta dapat memajukan perekonomian masyarakat yang berdampak besar terhadap perkembangan ekonomi

masyarakat pada suatu negara. Dinas Pariwisata adalah suatu Lembaga Pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Pangandaran.

Kepariwisataan ini diharapkan dapat mengembangkan daerah dan dapat memberikan manfaat yang besar Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Masyarakat. Dinas Pariwisata menyelenggarakan kepariwisataan dan mengawasi seluruh destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran.

Untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk meningkatkan pariwisata salah satunya yaitu melakukan pengembangan di sektor wisata yang dipandang masih rendah daya tarik dan lainnya. Hal ini dilakukan supaya Obyek Wisata Karangnini bisa lebih dikenal oleh kalangan wisatawan baik local maupun wisatawan luar..

## **1. Daya Tarik**

Daya tarik wisata memiliki kekuatan tersendiri sebagai komponen pariwisata karena dapat memunculkan motivasi bagi wisatawan dan menarik wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata.

Untuk mengetahui mengenai daya tarik dalam Strategi Pengembangan Obyek Wisata Karangnini Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, maka penulis uraikan hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Obyek wisata mempunyai sesuatu yang bisa dipertontonkan kepada wisatawan.**

Untuk mengetahui kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran melalui Obyek wisata mempunyai sesuatu yang bisa dipertontonkan kepada wisatawan maka berikut ini penulis sajikan hasil wawancara yang antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara dengan informan 1 selaku Kepala Dinas Pariwisata yang menyatakan bahwa :

Dalam hal ini obyek wisata Karangnini sudah memiliki sesuatu yang bisa dipertontonkan kepada wisatawan, contohnya seperti penataan lingkungan wisata, namun hal ini belum maksimal karena masih banyak lagi yang bisa disajikan atau dibuat supaya bisa menarik daya wisatawan. Oleh karena itu, perhatian ataupun dukungan dari Dinas Pariwisata diharapkan lebih maksimal lagi supaya.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan informan 2 selaku Kabid Pengelolaan Destinasi Kepariwisata menyatakan bahwa:

Obyek Wisata Karangnini sampai saat ini kawasan wisatanya cukup menarik daya tarik wisatawan, namun masih ada beberapa lokasi atau kawasan yang dirasa masih kurang maksimal. Contohnya seperti pintu masuk wisata masih kurang terlihat bagus, dan penataan tempat-tempat shelter yang ada dikawasan wisata perlu ditingkatkan lagi.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 3 selaku Kabid Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Pemasaran menyatakan bahwa :

Sebagian besar keadaan Obyek wisata Karangnini saat ini sudah cukup memadai, tinggal menambah sedikit-sedikit kawasan wisata yang dirasa masih kurang bagus. Hal ini harus dilakukan supaya dapat menjadi daya tarik yang lebih bagi para pengunjung wisatawan.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 4 selaku Kasi Pengelolaan Destinasi Kepariwisataaan menyatakan bahwa:

Kami sebagai pengelola kepariwisataan, dalam hal ini sedang berusaha merencanakan program untuk pengembangan obyek wisata karangnini agar bisa memberikan daya tarik kepada wisatawan, juga dalam hal pemasaran bisa ada sesuatu yang dipertontonkan atau di iklankan.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 5 selaku anggota bidang kepariwisataan menyatakan bahwa:

Sampai saat ini kawasan wisata karangnini sudah cukup bagus, meskipun ada beberapa kawasan yang harus diperindah lagi supaya lebih memberikan kenyamanan dan keindahan kepada para pengunjung wisata.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 6 selaku Kepala Desa Emplak menyatakan bahwa :

Kami sebagai warga emplak, khususnya yang berada di kawasan wisata karangnini, merasa pengelolaan kawasan wisata karangnini masih kurang maksimal. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi wisata karangnini saat ini, dimana banyaknya wisata lain yang sudah berkembang pesat

terutama dalam bidang infrastruktur dan sarana prasarana sebagai penunjang daya tarik wisata.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 7 selaku perwakilan Perangkat Desa Emplak menyatakan bahwa :

Sampai saat ini kawasan wisata karangnini masih kurang maksimal dalam penataan lingkungan dan sarana penunjang wisata. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dan pengelola kebijakan pemerintah daerah.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 8 selaku perwakilan Tokoh Masyarakat Desa Emplak menyatakan bahwa :

Memang pada dasarnya keadaan wisata karangnini saat ini cukup bagus, namun dari segi daya tarik dan keindahan kawasan wisata masih kurang. Hal ini dikarenakan pihak pengelola kurang maksimal dalam mengembangkan kawasan wisata karangnini. Hal ini menjadi masalah diakibatkan tingkat pemasarannya masih kurang daya dukung dari segi keindahan dan sarana penunjangnya.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa selama ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum sepenuhnya melakukan pengembangan wisata di Karangnini. Permasalahan yang dihadapi selama ini disebabkan kurangnya rutinitas kegiatan yang dilakukan oleh pengelola wisata sehingga kesulitan dalam mengembangkan objek wisata. Oleh karena itu maka dilakukan pengembangan

dengan berbagai cara seperti memperlihatkan daya tarik wisata supaya bisa memberikan tontonan yang bagus kepada para wisatawan di Kabupaten Pangandaran.

Begitupula dengan hasil observasi terlihat bahwa kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran melalui obyek wisata mempunyai sesuatu yang bisa dipertontonkan kepada wisatawan belum optimal, contohnya seperti tidak adanya kegiatan permainan atau fun game yang dilakukan oleh pengelola.

Menurut Musanef, (2011:11) menyatakan bahwa : “Segala suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahannya, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna”.

Dengan demikian pengembangan wisata oleh Dinas Pariwisata di Obyek Wisata Karangnini Desa Emplak Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran belum optimal karena belum dilakukan secara terencana sehingga menyebabkan proses pelaksanaan pengembangan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan.

Oleh karena itu maka perlu adanya rencana pengembangan sekaligus pelaksanaannya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata terhadap wisata Karangnini khususnya. Sehingga lebih berkembang dan memberikan daya tarik yang bagus bagi para pengunjung wisata.

**b. Mempunyai tempat atau shelter sebagai tempat rilek wisata ketika berkunjung**

Untuk mengetahui kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran melalui Obyek wisata mempunyai tempat atau shelter sebagai tempat rilek wisata ketika berkunjung maka berikut ini penulis sajikan hasil wawancara yang antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara dengan informan 1 selaku Kepala Dinas Pariwisata yang menyatakan bahwa :

Dalam hal ini ada beberapa shelter yang disediakan, namun pada dasarnya karena wisata ini sebagian besar pinggiran pantai maka agak sulit dalam membangun shelter tersebut.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan informan 2 selaku Kabid Pengelolaan Destinasi Kepariwisataan menyatakan bahwa:

Obyek Wisata Karangnini sudah ada sebagian shelter, meskipun tidak begitu banyak. Sebagian pengunjung lebih memilih sewa tikar agar lebih bisa bersantai dan tidak merasa terburu-buru.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 3 selaku Kabid Pembinaan Usaha Kepariwisataan dan Pemasaran menyatakan bahwa:

Shelter yang ada di wisata karangnini belum begitu kumplit, yang sudah ada pun mulai ada yang rusak. Tapi meskipun demikian, banyak warga setempat yang menyediakan sewa tikar bagi para pengunjung wisata.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 4 selaku Kasi Pengelolaan Destinasi Kepariwisataan menyatakan bahwa:

Dalam hal ini ada beberapa shelter yang disediakan, namun pada dasarnya karena wisata ini sebagian besar pinggiran pantai maka agak sulit dalam membangun shelter tersebut.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 5 selaku anggota bidang kepariwisataan menyatakan bahwa:

Wisata Karangnini sudah ada sebagian shelter, meskipun tidak begitu banyak. Sebagian pengunjung lebih memilih sewa tikar agar lebih bisa bersantai dan tidak merasa terburu-buru.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 6 selaku Kepala Desa Emplak menyatakan bahwa :

Shelter di obyek wisata karangnini sudah ada, namun jumlahnya tidak begitu banyak. Disamping itu pula, pengunjung lebih memilih untuk sewa tikar agar lebih leluasa dan lebih santai.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 7 selaku perwakilan Perangkat Desa Emplak menyatakan bahwa :

Ada beberapa shelter yang disediakan, namun pada dasarnya karena wisata ini sebagian besar pinggiran pantai maka agak sulit dalam membangun shelter tersebut.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 8 selaku perwakilan Tokoh Masyarakat Desa Emplak menyatakan bahwa :

Keadaan wisata karangnini saat ini memang belum sepenuhnya maksimal dari segi sarana dan prasarana, namun tidak menyulutkan wisatawan untuk berkunjung. Terutama dalam perihal shelter, sudah ada meskipun tidak banyak.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa selama ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum sepenuhnya melakukan pengembangan wisata di Karangnini. Permasalahan yang dihadapi selama ini disebabkan kurangnya rutinitas kegiatan yang dilakukan oleh pengelola wisata sehingga kesulitan dalam mengembangkan objek wisata. Oleh karena itu maka dilakukan pengembangan dengan berbagai cara seperti menyediakan shelter lebih banyak agar wisatawan semakin merasa nyaman berkunjung ke karangnini.

Begitupula dengan hasil observasi terlihat bahwa kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran melalui obyek wisata memperbanyak shelter dan memperbaiki shelter yang rusak yang selama ini sudah dibangun namun jumlahnya masih kurang.



Menurut Musanef, (2011:11) menyatakan bahwa : “Segala suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna”.

Dengan demikian pengembangan wisata oleh Dinas Pariwisata di Obyek Wisata Karangnini Desa Emplak Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran belum optimal karena belum dilakukan secara terencana sehingga menyebabkan proses pelaksanaan pengembangan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan.

Oleh karena itu maka perlu adanya rencana pengembangan sekaligus pelaksanaannya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata terhadap wisata Karangnini khususnya. Sehingga lebih berkembang dan memberikan daya tarik yang bagus bagi para pengunjung wisata.

**c. Mempunyai fasilitas atau pusat berbelanja sebagai ciri khas atau icon untuk dijadikan oleh-oleh**

Untuk mengetahui kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran melalui Obyek wisata mempunyai fasilitas atau pusat berbelanja sebagai ciri khas atau icon untuk dijadikan oleh-oleh maka berikut ini penulis sajikan hasil wawancara yang antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara dengan informan 1 selaku Kepala Dinas Pariwisata yang menyatakan bahwa :

Dalam hal ini di wisata karangnini belum ada pusat berbelanja yang bisa dijadikan sebagai pusat oleh-oleh khas karangnini. Hal ini dikarenakan

keterbatasan para pelaku usaha yang keterbatasan modal serta lokasi usaha yang belum tersedia.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan informan 2 selaku Kabid Pengelolaan Destinasi Kepariwisata menyatakan bahwa:

Fasilitas atau pusat berbelanja untuk dijadikan pusat oleh-oleh, untuk sementara ini belum tersedia. Hal ini dikarenakan keterbatasan lokasi untuk dijadikan tempat berbelanja, juga keterbatasan pelaku usaha dan modal.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 3 selaku Kabid Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Pemasaran menyatakan bahwa:

Pusat perbelanjaan atau tempat oleh-oleh, di wisata karangnini belum tersedia. Disinilah perlu adanya pengembangan terkait penataan kawasan wisata agar semakin memberikan kenyamanan kepada para pengunjung wisata.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 4 selaku Kasi Pengelolaan Destinasi Kepariwisata menyatakan bahwa:

Dalam hal ini di wisata karangnini belum ada pusat berbelanja yang bisa dijadikan sebagai pusat oleh-oleh khas karangnini. Hal ini dikarenakan keterbatasan para pelaku usaha yang keterbatasan modal serta lokasi usaha yang belum tersedia.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 5 selaku anggota bidang kepariwisataan menyatakan bahwa:

Di wisata karangnini memang belum ada pusat perbelanjaan oleh-oleh, tetapi kalau untuk warung-warung kecil sudah ada. Maka dari itu, untuk kedepannya diharapkan ada pengembangan terkait penataan wisata khususnya lingkungan sebagai sarana penunjang wisata.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 6 selaku Kepala Desa Emplak menyatakan bahwa :

Fasilitas atau pusat berbelanja untuk dijadikan pusat oleh-oleh, untuk sementara ini belum tersedia. Hal ini dikarenakan keterbatasan lokasi untuk dijadikan tempat berbelanja, juga keterbatasan pelaku usaha dan modal.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 7 selaku perwakilan Perangkat Desa Emplak menyatakan bahwa :

Ada beberapa faktor kenapa di wisata karangnini belum ada pusat perbelanjaan untuk oleh, diantaranya yaitu lokasi belum tersedia serta pengusaha atau pemodal juga belum ada. Untuk kedepannya diharapkan peran pemerintah daerah dalam hal pengembangan pusat perbelanjaan oleh-oleh bisa direncanakan.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 8 selaku perwakilan Tokoh Masyarakat Desa Emplak menyatakan bahwa :

Wisata Karangnini memang belum ada pusat perbelanjaan oleh-oleh, tetapi kalau untuk warung-warung kecil sudah ada. Maka dari itu, untuk kedepannya diharapkan ada pengembangan terkait penataan wisata khususnya lingkungan sebagai sarana penunjang wisata.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa selama ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum sepenuhnya melakukan pengembangan wisata di Karangnini. Permasalahan yang dihadapi selama ini disebabkan kurangnya rutinitas kegiatan yang dilakukan oleh pengelola wisata sehingga kesulitan dalam mengembangkan objek wisata. Oleh karena itu maka dilakukan pengembangan dengan berbagai cara seperti menyediakan pusat oleh-oleh dan membikin makanan khas Karangnini sebagai bentuk icon sebuah tempat wisata.

Begitupula dengan hasil observasi terlihat bahwa kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran melalui obyek wisata belum menyediakan tempat atau pusat oleh-oleh yang representatif untuk menjual berbagai macam produk atau makanan khas Karangnini. Warung yang tersedia hanya sebatas menjual makanan ringan dan minuman ala kadarnya. Hal ini terlihat sebagaimana gambar berikut ini.



Menurut Kotler, (2001:115) menyatakan bahwa : “segala hal yang dapat memudahkan suatu produk untuk dipasarkan, Fasilitas juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk pembelian manfaat dai perusahaan kepada konsumen pengguna yang diberikan atas dasar pembayaran sejumlah uang”.

Dengan demikian pengembangan wisata oleh Dinas Pariwisata di Obyek Wisata Karangnini Desa Emplak Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran belum optimal maka perlu adanya pengembangan dari segi fasilitas sebagai pusat perbelanjaan oleh-oleh bagi para pengunjung wisata karangnini.

## **2. Aksesibilitas**

Dalam hal ini dimaksudkan agar wisatawan domestik dan mancanegara dapat dengan mudah mencapai tempat wisata tersebut. objek wisata dapat dijadikan sebagai salah satu objek wisata yang menarik, maka faktor yang sangat menunjang adalah kelengkapan dari sarana dan prasarana objek wisata tersebut, maka berikut ini penulis sajikan hasil wawancara yang antara lain sebagai berikut :

### **a. Akses jalan menuju lokasi memadai dan bagus**

Untuk mengetahui kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran melalui Obyek wisata mengenai akses jalan

menuju lokasi memadai dan bagus, berikut ini penulis sajikan hasil wawancara yang antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara dengan informan 1 selaku Kepala Dinas Pariwisata yang menyatakan bahwa :

Akses jalan menuju lokasi karangnini pada saat ini sudah mulai pada rusak, belum ada perbaikan yang maksimal. Namun saat ini kami sedang mengusahakan atau merencanakan terkait akses jalan yang rusak.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan informan 2 selaku Kabid Pengelolaan Destinasi Kepariwisataaan menyatakan bahwa:

Akses jalan menuju wisata karangnini, saat sedang kamin upayakan untuk pengajuan perbaikan, hal ini dilakukan demi kenyamanan para pengunjung wisata.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 3 selaku Kabid Pembinaan Usaha Kepariwisataaan dan Pemasaran menyatakan bahwa:

Pengajuan perbaikan jalan menuju wisata saat sedang dalam perencanaan, mudah-mudahan akhir tahun ini bisa realisasi atau paling lambat awal tahun depan.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 4 selaku Kasi Pengelolaan Destinasi Kepariwisataaan menyatakan bahwa:

Keterbatasan anggaran masih menjadi masalah, apalagi semenjak tahun-tahun kemarin waktu pandemic. Sehingga banyak sekali slot anggaran yang di oper alihkan penggunaannya.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 5 selaku anggota bidang kepariwisataan menyatakan bahwa:

Meskipun akses jalan menuju lokasi karangnini sudah mulai pada rusak, tetapi kami sebagai pengelola selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan obyek wisata tersebut.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 6 selaku Kepala Desa Emplak menyatakan bahwa :

Akses jalan menuju lokasi karangnini memang masih termasuk jalan desa, namun untuk saat ini keuangan desa belum sepenuhnya bisa mengcover infrastruktur yang memakan anggaran besar. Karena anggaran desa tidak bisa sepenuhnya dipergunakan untuk infrastruktur jalan saja, harus disesuaikan dengan pengajuan anggaran dalam RPJM.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 7 selaku perwakilan Perangkat Desa Emplak menyatakan bahwa :

Akses jalan wisata karangnini memang sudah pada rusak, hal ini menjadi PR kita Bersama bagaimana kedepannya agar infrastruktur jalan ini bisa cepat diperbaiki dan kalua bisa diperlebar.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 8 selaku perwakilan Tokoh Masyarakat Desa Emplak menyatakan bahwa :

Masyarakat hanya bisa mengeluh terkait jalan yang sudah pada rusak, namun demikian tidak menutup kemungkinan kami selalu bergotong royong untuk bisa memperbaiki jalan yang berlubang dengan swadaya yang ada.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa selama ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum sepenuhnya melakukan pengembangan wisata di Karangnini. Permasalahan yang dihadapi selama ini disebabkan kurangnya rutinitas kegiatan yang dilakukan oleh pengelola wisata sehingga kesulitan dalam mengembangkan objek wisata. Oleh karena itu maka dilakukan pengembangan dengan cara memperbaiki akes jalan yang rusak.

Begitupula dengan hasil observasi terlihat bahwa Dinas Pariwisata memperbaiki dan memperlebar akses jalan menuju wisata sebagai salah satu infrastruktur penunjang kenyamanan para wisatawan yang datang.



Menurut Tjiptono (2014:159), aksesibilitas adalah lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana transportasi umum. Indikator dari aksesibilitas yaitu: jarak : akses ketempat lokasi, transportasi : arus lalu lintas”.

Dengan demikian pengembangan wisata oleh Dinas Pariwisata di Obyek Wisata Karangnini Desa Emplak Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dalam akses jalan belum optimal maka perlu adanya pengembangan dari segi ifrastruktur sebagai akses jalan menuju lokasi wisata bagi para pengunjung wisata karangnini.

#### **b. Adanya fasilitas telekomunikasi umum**

Untuk mengetahui kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran melalui Obyek wisata mengenai fasilitas telekomunikasi umum, berikut ini penulis sajikan hasil wawancara yang antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara dengan informan 1 selaku Kepala Dinas Pariwisata yang menyatakan bahwa :

Fasilitas di wisata karangnini dari bidang komunikasi belum tersedia dengan maksimal, hanya sebatas pengeras suara biasa yang digunakan pegawai untuk memberikan pemberitahuan kepada para pengunjung.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan informan 2 selaku Kabid Pengelolaan Destinasi Kepariwisataan menyatakan bahwa:

Fasilitas komunikasi umum di wisata karang ini belum tersedia, hal ini sudah direncanakan untuk segera dibuat.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 3 selaku Kabid Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Pemasaran menyatakan bahwa:

Hanya ada pengeras suara sebagai salah satu alat komunikasi umum dengan para pengunjung wisata.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 4 selaku Kasi Pengelolaan Destinasi Kepariwisata menyatakan bahwa:

Keterbatasan anggaran masih menjadi masalah, apalagi semenjak tahun-tahun kemarin waktu pandemic. Sehingga banyak sekali slot anggaran yang di oper alihkan penggunaannya.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 5 selaku anggota bidang kepariwisataan menyatakan bahwa:

Meskipun fasilitas komunikasi belum maksimal, tetapi para pengelola dan pegawai berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik kepada setiap wisatawan.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 6 selaku Kepala Desa Emplak menyatakan bahwa :

Hanya ada pengeras suara sebagai salah satu alat komunikasi umum dengan para pengunjung wisata.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 7 selaku perwakilan Perangkat Desa Emplak menyatakan bahwa :

Fasilitas komunikasi umum di wisata Karang nini belum tersedia, hal ini sudah direncanakan untuk segera dibuat.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 8 selaku perwakilan Tokoh Masyarakat Desa Emplak menyatakan bahwa :

Fasilitas di wisata Karangnini dari bidang komunikasi belum tersedia dengan maksimal, hanya sebatas pengeras suara biasa yang digunakan pegawai untuk memberikan pemberitahuan kepada para pengunjung.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa selama ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum sepenuhnya melakukan pengembangan wisata di Karangnini. Permasalahan yang dihadapi selama ini disebabkan kurangnya rutinitas kegiatan yang dilakukan oleh pengelola wisata sehingga kesulitan dalam mengembangkan objek wisata. Oleh karena itu maka dilakukan pengembangan dengan cara menyediakan fasilitas telekomunikasi umum bagi para pengunjung wisata.

Begitupula dengan hasil observasi terlihat bahwa kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran melalui obyek

wisata yaitu dengan menyediakan fasilitas telekomunikasi umum atau tempat sumber suara yang bisa dijadikan sumber informasi bagi para wisatawan.

Menurut Laswell (2014:67-71), komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan”.

Dengan demikian pengembangan wisata oleh Dinas Pariwisata di Obyek Wisata Karangnini Desa Emplak Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dalam akses telekomunikasi belum optimal maka perlu adanya pengembangan dari segi penyediaan komunikasi sebagai pelayanan terhadap para pengunjung.

### **c. Tersedia transportasi wisata**

Untuk mengetahui kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran melalui Obyek wisata mengenai fasilitas transportasi wisata, berikut ini penulis sajikan hasil wawancara yang antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara dengan informan 1 selaku Kepala Dinas Pariwisata yang menyatakan bahwa :

Transportasi wisata di wisata karangnini belum ada sama sekali.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan informan 2 selaku Kabid Pengelolaan Destinasi Kepariwisataan menyatakan bahwa:

Transportasi wisata di karangnini memang belum ada, namun kami sebagai pihak pengelola sedang berusaha merencanakan.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 3 selaku Kabid Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Pemasaran menyatakan bahwa:

Belum ada transportasi wisata di obyek wisata karangnini.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 4 selaku Kasi Pengelolaan Destinasi Kepariwisata menyatakan bahwa:

Memang belum ada alat transportasi wisata di obyek wisata karangnini.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 5 selaku anggota bidang kepariwisataan menyatakan bahwa:

Sampai saat ini belum ada alat transportasi wisata di obyek wisata karangnini.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 6 selaku Kepala Desa Emplak menyatakan bahwa :

Penting memang adanya alat transportasi wisata, maka dari itu kami pemerintah desa sedang berusaha untuk mencari cara bagaimana supaya bisa menyediakan alat transportasi wisata.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 7 selaku perwakilan Perangkat Desa Emplak menyatakan bahwa :

Belum ada alat transportasi wisata.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 8 selaku perwakilan Tokoh Masyarakat Desa Emplak menyatakan bahwa :

Alat transportasi wisata sampai saat ini belum tersedia, maka perlu adanya pengembangan dan pengajuan untuk fasilitas tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa selama ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum sepenuhnya melakukan pengembangan wisata di Karangnini. Permasalahan yang dihadapi selama ini disebabkan kurangnya rutinitas kegiatan yang dilakukan oleh pengelola wisata sehingga kesulitan dalam mengembangkan objek wisata. Oleh karena itu maka dilakukan pengembangan dengan cara mengajukan fasilitas transportasi wisata supaya cepat terealisasi.

Begitupula dengan hasil observasi terlihat bahwa kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran melalui obyek wisata yaitu dengan menyediakan alat transportasi wisata sebagai penunjang fasilitas obyek wisata, contohnya seperti mobil bak pengangkut wisata menuju lokasi.

Menurut Adisasmita (2014:234), transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan diakhiri”.

Dengan demikian pengembangan wisata oleh Dinas Pariwisata di Obyek Wisata Karangnini Desa Emplak Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran

dalam akses telekomunikasi belum optimal maka perlu adanya pengembangan dari segi penyediaan komunikasi sebagai pelayanan terhadap para pengunjung.

**d. Adanya pos pelayanan sebagai pusat informasi wisata**

Untuk mengetahui kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran melalui Obyek wisata mengenai fasilitas pos pelayanan sebagai pusat informasi wisata, berikut ini penulis sajikan hasil wawancara yang antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara dengan informan 1 selaku Kepala Dinas Pariwisata yang menyatakan bahwa :

Pos pelayanan informasi seputar wisata karangnini sudah tersedia, bagi para pengunjung yang membutuhkan informasi bisa mendatangi pos pelayanan tersebut.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan informan 2 selaku Kabid Pengelolaan Destinasi Kepariwisataan menyatakan bahwa:

Di obyek wisata karangnini sudah tersedia pos pelayanan informasi bagi para pengunjung yang membutuhkan informasi seputar wisata karangnini.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 3 selaku Kabid Pembinaan Usaha Kepariwisataan dan Pemasaran menyatakan bahwa:

Pos pelayanan informasi bagi para pengunjung sudah tersedia.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 4 selaku Kasi Pengelolaan Destinasi Kepariwisata menyatakan bahwa:

Pengunjung bisa mendatangi pos pelayanan yang sudah tersedia di area wisata.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 5 selaku anggota bidang kepariwisataan menyatakan bahwa:

Saat ini sudah ada pos pelayanan informasi bagi para pengunjung yang membutuhkan info mengenai obyek wisata.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 6 selaku Kepala Desa Emplak menyatakan bahwa :

Pos pelayanan informasi untuk para pengunjung sudah tersedia di lokasi wisata.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 7 selaku perwakilan Perangkat Desa Emplak menyatakan bahwa :

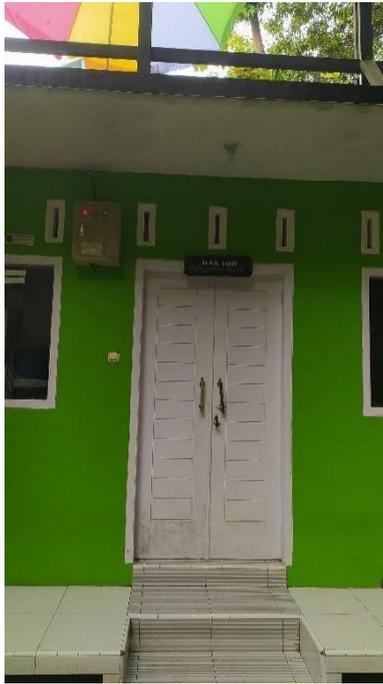
Pos pelayanan informasi sudah ada.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 8 selaku perwakilan Tokoh Masyarakat Desa Emplak menyatakan bahwa :

Bagi para wisatawan yang baru datang ke Karangnini bisa mendatangi pos pelayanan informasi terlebih dahulu agar bisa mendapatkan informasi yang akurat mengenai wisata Karangnini.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa selama ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum sepenuhnya melakukan pengembangan wisata di Karangnini. Permasalahan yang dihadapi selama ini disebabkan kurangnya rutinitas kegiatan yang dilakukan oleh pengelola wisata sehingga kesulitan dalam mengembangkan objek wisata. Oleh karena itu maka dilakukan pengembangan dengan cara memaksimalkan pos pelayanan informasi yang sudah ada, sehingga bisa lebih memudahkan pengunjung dalam mendapatkan informasi.

Begitupula dengan hasil observasi terlihat bahwa pos pelayanan informasi bagi wisatawan sudah tersedia, sehingga bisa lebih memudahkan pengunjung dalam mendapatkan informasi.



Menurut Adisasmita (2014:234), “transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan diakhiri”.

Dengan demikian pengembangan wisata oleh Dinas Pariwisata di Obyek Wisata Karangnini Desa Emplak Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dalam penyediaan pos pelayanan informasi sudah cukup optimal namun perlu adanya peningkatan pos pelayanan informasi sebagai bentuk pelayanan terbaik terhadap para pengunjung.

### **3. Fasilitas**

Dalam hal ini dimaksudkan agar wisatawan domestik dan mancanegara dapat dengan mudah mencapai tempat wisata tersebut. Objek wisata dapat dijadikan sebagai salah satu objek

wisata yang menarik, maka faktor yang sangat menunjang adalah kelengkapan dari fasilitas objek wisata tersebut, maka berikut ini penulis sajikan hasil wawancara yang antara lain sebagai berikut:

**a. Adanya fasilitas penginapan, hotel, villa dan restaurant**

Untuk mengetahui kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran melalui Obyek wisata mengenai adanya fasilitas penginapan, hotel, villa dan restaurant sebagai sarana penunjang kebutuhan, berikut ini penulis sajikan hasil wawancara yang antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara dengan informan 1 selaku Kepala Dinas Pariwisata yang menyatakan bahwa :

Di obyek wisata karangnini saat ini sudah ada beberapa penginapan yang sudah berdiri cukup lama, alau untuk hotel, villa belum ada. Adapun restaurant itu hanya rumah makan biasa yang dimiliki oleh warga sekitar dalam mencari nafkah.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan informan 2 selaku Kabid Pengelolaan Destinasi Kepariwisataaan menyatakan bahwa:

Untuk saat ini memang belum tersedia hotel ataupun restaurant yang bagus, tetapi kalua untuk penginapan sudah ada.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 3 selaku Kabid Pembinaan Usaha Kepariwisataaan dan Pemasaran menyatakan bahwa:

Penginapan di wisata karangnini sudah ada, yang belum ad aitu hotel dan restaurant yang bagus.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 4 selaku Kasi Pengelolaan Destinasi Kepariwisataa menyatakan bahwa:

Untuk saat ini belum ada investor atau pengusaha yang mendirikan hotel ataupun restaurant di wisata karangnini.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 5 selaku anggota bidang kepariwisataan menyatakan bahwa:

Untuk saat ini memang belum tersedia hotel ataupun restaurant yang bagus, tetapi kalua untuk penginapan sudah ada.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 6 selaku Kepala Desa Emplak menyatakan bahwa :

Di obyek wisata karangnini saat ini sudah ada beberapa penginapan yang sudah berdiri cukup lama, alau untuk hotel, villa belum ada. Adapun restaurant itu hanya rumah makan biasa yang dimiliki oleh warga sekitar dalam mencari nafkah.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 7 selaku perwakilan Perangkat Desa Emplak menyatakan bahwa :

Penginapan di wisata karangnini sudah ada, yang belum ada itu hotel dan restaurant yang bagus.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 8 selaku perwakilan Tokoh Masyarakat Desa Emplak menyatakan bahwa :

Memang belum ada hotel dan restaurant di obyek wisata karangnini, mungkin ini disebabkan karena tidak adanya investor atau pengusaha yang belum mau mendirikan hotel di daerah karangnini.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa selama ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum sepenuhnya melakukan pengembangan wisata di Karangnini. Permasalahan yang dihadapi selama ini disebabkan kurangnya rutinitas kegiatan yang dilakukan oleh pengelola wisata sehingga kesulitan dalam mengembangkan objek wisata. Oleh karena itu maka dilakukan pengembangan dengan cara melakukan pendekatan kepada investor-investor atau pengusaha yang bergerak di bidang perhotelan dan restaurant supaya bisa mengembangkan usahanya di daerah karangnini.

Begitupula dengan hasil observasi terlihat bahwa kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran melalui obyek wisata yaitu dengan melakukan pendekatan kepada setiap pengusaha perhotelan dan restaurant agar bisa bekerjasama mendirikan atau membangun hotel di kawasan wisata karangnini.



Menurut Hurdawaty dan Parantika (2018:7), Hotel merupakan tempat menginap yang terdiri atas beberapa atau banyak kamar yang disewakan kepada masyarakat umum untuk waktu- waktu tertentu serta menyediakan makanan dan minuman untuk para tamunya”.

Dengan demikian pengembangan wisata oleh Dinas Pariwisata di Obyek Wisata Karangnini Desa Emplak Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dalam menyediakan sarana umum hotel, penginapan dan restoran belum optimal maka perlu adanya pengembangan dari bidang perhotelan dan restaurant.

**b. Adanya kamar mandi atau WC umum sebagai saran penunjang kebutuhan**

Untuk mengetahui kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran melalui Obyek wisata mengenai adanya kamar mandi atau WC umum sebagai sarana penunjang kebutuhan, berikut ini penulis sajikan hasil wawancara yang antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara dengan informan 1 selaku Kepala Dinas Pariwisata yang menyatakan bahwa :

Kalau untuk sarana kamar mandi dan wc umum sudah ada, namun masih sarana milik pribadi tetapi bisa di sewakan. tetapi kalau milik pemerintah setempat atau milik pengelola untuk saat ini belum tersedia, karena belum ada musyawarah terkait itu. terutama dengan masyarakat yang mempunyai usaha jasa penyewaan kamar mandi dan wc.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan informan 2 selaku Kabid Pengelolaan Destinasi Kepariwisataaan menyatakan bahwa:

Kamar mandi dan wc saat ini tersedia, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak karena tempat tersebut milik warga yang sengaja membikin kamar mandi untuk disewakan kepada para pengunjung.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 3 selaku Kabid Pembinaan Usaha Kepariwisataaan dan Pemasaran menyatakan bahwa:

Dalam hal ini fasilitas wc umum memang paling diutamakan, kearena merupakan kebutuhan yang sangat penting, sehingga masyarakat yang memiliki modal untuk membangun kamar mandi mereka melaukannya dengan paling banyak 2 lokal.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 4 selaku Kasi Pengelolaan Destinasi Kepariwisataaan menyatakan bahwa:

Kamar mandi dan wc sudah tersedia, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Tetapi sudah cukup bisa memberikan kenyamanan kepada pengunjung Ketika ada yang mau bersih-bersih dan buang air.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 5 selaku anggota bidang kepariwisataan menyatakan bahwa:

Untuk saat ini kamar mandi dan wc di wisata karangnini sudah ada, namun masih milik pribadi masyarakat sekitar yang sengaja membuat kamar mandi untuk disewakan. Pihak pengelola kedepannya berencana menyediakan kamar mandi dan wc umum khusus untuk para pengunjung wisata.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 6 selaku Kepala Desa Emplak menyatakan bahwa :

Sampai saat ini kamar mandi dan wc umum di wisata karangnini sudah ada, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang ingin buang air dan mandi.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 7 selaku perwakilan Perangkat Desa Emplak menyatakan bahwa :

Kamar mandi dan wc sudah tersedia, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Tetapi sudah cukup bisa memberikan kenyamanan kepada pengunjung Ketika ada yang mau bersih-bersih dan buang air.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 8 selaku perwakilan Tokoh Masyarakat Desa Emplak menyatakan bahwa :

Masyarakat khususnya yang berada di wilayah wisata Karangnini saat ini menyediakan kamar mandi dan wc umum, disamping itu untuk kebutuhan para pengunjung tetapi di sisi lain juga sebagai pendapatan jasa sewa kamar mandi.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa selama ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum sepenuhnya melakukan pengembangan wisata di Karangnini. Permasalahan yang dihadapi selama ini disebabkan kurangnya rutinitas kegiatan yang dilakukan oleh pengelola wisata sehingga kesulitan dalam mengembangkan objek wisata. Oleh karena itu maka dilakukan pengembangan dengan cara merencanakan penyediaan kamar mandi dan wc umum khusus bagi para pengunjung wisata.

Begitupula dengan hasil observasi terlihat bahwa kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran melalui obyek wisata yaitu dengan menyediakan kamar mandi dan wc umum sebagai salah satu infrastruktur penunjang kenyamanan para wisatawan yang datang.



Menurut Suparlan (2012:19), Sanitasi tempat-tempat umum merupakan suatu usaha untuk mengawasi, mencegah, dan mengendalikan kerugian akibat dari pemanfaatan tempat maupun hasil usaha oleh dan untuk umum terutama yang erat hubungannya dengan timbulnya penyakit”.

Dengan demikian pengembangan wisata oleh Dinas Pariwisata di Obyek Wisata Karangnini Desa Emplak Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dalam menyediakan sarana umum kamar mandi dan wc belum optimal maka perlu adanya pengembangan dari sarana kamar mandi dan wc bagi para pengunjung wisata karangnini.

**c. Memiliki kawasan parkir yang luas dan muat untuk banyak kendaraan**

Untuk mengetahui kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran melalui Obyek wisata mengenai adanya

kawasan parkir yang luas dan muat untuk banyak kendaraan, berikut ini penulis sajikan hasil wawancara yang antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara dengan informan 1 selaku Kepala Dinas Pariwisata yang menyatakan bahwa :

Saat ini wisata karangnini sudah memiliki kawasan parkir kendaraan yang cukup luas, kawasan parkir ini muat cukup banyak kendaraan sehingga para pengunjung bisa nyaman dalam memarkirkan kendaraannya.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan informan 2 selaku Kabid Pengelolaan Destinasi Kepariwisataaan menyatakan bahwa:

Kawasan parkir kendaraan di wisata karangnini sudah tersedia lahan parkir yang cukup luas dan aman, sehingga para pengunjung tidak perlu khawatir untuk memarkirkan kendaraannya.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 3 selaku Kabid Pembinaan Usaha Kepariwisataaan dan Pemasaran menyatakan bahwa:

Kawasan parkir di wisata karangnini sudah tersedia lahan parkir yang cukup luas, bisa menampung kendaraan dengan jumlah yang cukup banyak.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 4 selaku Kasi Pengelolaan Destinasi Kepariwisataaan menyatakan bahwa:

Saat ini wisata karangnini sudah memiliki kawasan parkir kendaraan yang cukup luas, kawasan parkir ini muat cukup banyak kendaraan sehingga para pengunjung bisa nyaman dalam memarkirkan kendaraannya.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 5 selaku anggota bidang kepariwisataan menyatakan bahwa:

Lahan parkir di wisata karangnini cukup luas dan aman, sehingga pengunjung tidak perlu khawatir untuk memarkirkan kendarannya.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 6 selaku Kepala Desa Emplak menyatakan bahwa :

Kawasan parkir kendaraan di wisata karangnini sudah tersedia lahan parkir yang cukup luas dan aman, sehingga para pengunjung tidak perlu khawatir untuk memarkirkan kendaraannya.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 7 selaku perwakilan Perangkat Desa Emplak menyatakan bahwa :

Saat ini wisata karangnini sudah memiliki kawasan parkir kendaraan yang cukup luas, kawasan parkir ini muat cukup banyak kendaraan sehingga para pengunjung bisa nyaman dalam memarkirkan kendaraannya.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 8 selaku perwakilan Tokoh Masyarakat Desa Emplak menyatakan bahwa :

Keadaan lahan parkir di wisata karangnini untuk saat ini sudah tersedia lahan parkir kendaraan yang cukup luas. Parkiran tersebut bisa masuk cukup banyak kendaraan wisata, selain itu juga tempatnya aman dan nyaman.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa selama ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah cukup berusaha dalam melakukan pengembangan wisata di Karangnini. Oleh karena itu maka perlu dilakukan peningkatan dalam pengembangan dengan cara menata lahan parkir dengan lebih baik lagi.

Begitupula dengan hasil observasi terlihat bahwa kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran melalui kawasan lahan parkir yang cukup luas sebagai salah satu sarana penunjang kenyamanan para wisatawan yang datang.



Menurut Khisty dan Lall (2005:127), Parkir adalah lalu lintas berhenti yang ditinggal pengemudi saat mencapai suatu tempat tujuan dengan jangka waktu tertentu. Perilaku pengendara kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk memarkir kendaraannya tidak jauh dengan tempat kegiatannya”.

Dengan demikian pengembangan wisata oleh Dinas Pariwisata di Obyek Wisata Karangnini Desa Emplak Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dalam menyediakan sarana umum lahan parkir maka perlu adanya pengembangan di lokasi lahan parkir wisata.

#### **4. Lembaga Pengelola**

Dalam hal ini dimaksudkan agar wisatawan domestik dan mancanegara dapat dengan mudah mencapai tempat wisata tersebut. Objek wisata dapat dijadikan sebagai salah satu objek wisata yang menarik, maka faktor yang sangat menunjang adalah Lembaga pengelola bisa lebih maksimal dalam mengembangkan objek wisata tersebut, maka berikut ini penulis sajikan hasil wawancara yang antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak Pemerintah atau Dinas Pariwisata mengalokasikan dana untuk pengembangan pariwisata.

Untuk mengetahui kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran melalui Obyek wisata mengenai adanya pengalokasian dana untuk pengembangan wisata, berikut ini penulis sajikan hasil wawancara yang antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara dengan informan 1 selaku Kepala Dinas Pariwisata yang menyatakan bahwa :

Saat ini kami pihak pengelola khususnya dinas pariwisata sedang berusaha untuk menganggarkan dana untuk pengembangan obyek wisata karangnini.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan informan 2 selaku Kabid Pengelolaan Destinasi Kepariwisata menyatakan bahwa:

Memang kami dari dinas pariwisata sedang berusaha merencanakan atau menganggarkan untuk strategi pengembangan obyek wisata karangnini.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 3 selaku Kabid Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Pemasaran menyatakan bahwa:

Meskipun belum terlaksana penganggarannya, kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menganggarkan anggaran untuk pengembangan wisata karangnini.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 4 selaku Kasi Pengelolaan Destinasi Kepariwisata menyatakan bahwa:

Pada dasarnya kami selaku dinas pengelola pariwisata, ingin mengembangkan obyek wisata yang ada di Pangandaran. Namun mengingat anggaran yang terbatas, kami harus bisa memilih dan memilah mana dulu kawasan wisata yang bisa dikembangkan.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 5 selaku anggota bidang kepariwisataan menyatakan bahwa:

Belum ada kepastian tentang penganggaran dalam bidang pengembangan pariwisata karangnini.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 6 selaku Kepala Desa Emplak menyatakan bahwa :

Kami sebagai pemerintah desa selalu mendorong kepada dinas terkait untuk bisa lebih memperhatikan wisata kami yaitu karangnini. Bagaimanapun caranya, wisata kami harus bisa berkembang seperti wisata lainnya.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 7 selaku perwakilan Perangkat Desa Emplak menyatakan bahwa :

Pemerintah desa selalu mendukung aspirasi dari masyarakat, terutama dalam hal pengembangan wisata karangnini.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 8 selaku perwakilan Tokoh Masyarakat Desa Emplak menyatakan bahwa :

Sampai saat ini, aspirasi kami sebagai masyarakat sekitar wisata karangnini khususnya selalu mengajukan kepada dinas terkait supaya bisa lebih memperhatikan wisata karangnini.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa selama ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah cukup berusaha dalam melakukan pengembangan wisata di Karangnini. Oleh karena itu maka perlu dilakukan pengalokasian dana untuk pengembangan wisata karangnini.

Begitupula dengan hasil observasi terlihat bahwa kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Pariwisata masyarakat berharap wisata karangnini bisa lebih berkembang dengan bantuan berbagai pihak.

Menurut Nugroho (2003:119) “mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai”.

Dengan demikian pengembangan wisata oleh Dinas Pariwisata di Obyek Wisata Karangnini Desa Emplak Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dalam merencanakan anggaran untuk pengembangan wisata karangnini bisa lebih difokuskan lagi.

b. Adanya dukungan dari pihak swasta terhadap pengembangan obyek wisata karangnini.

Untuk mengetahui kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran melalui Obyek wisata mengenai adanya

dukungan dari pihak swasta terhadap obyek wisata karangnini, berikut ini penulis sajikan hasil wawancara yang antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara dengan informan 1 selaku Kepala Dinas Pariwisata yang menyatakan bahwa :

Sampai saat ini, kalau untuk dukungan materi ataupun yang lainnya dari pihak swasta memang belum ada. Tetapi kami selalu berusaha menggaet investor dari swasta agar mau ikut kerjasama dalam mengembangkan obyek wisata karangnini.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan informan 2 selaku Kabid Pengelolaan Destinasi Kepariwisataan menyatakan bahwa:

Hingga saat ini memang belum ada pihak swasta yang ikut membantu atau berkontribusi dalam pengembangan wisata karangnini.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 3 selaku Kabid Pembinaan Usaha Kepariwisataan dan Pemasaran menyatakan bahwa:

Kami berusaha untuk selalu mencari cara supaya bisa mengajak kerjasama kepada setiap pihak yang berkompeten dalam segi pariwisata.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 4 selaku Kasi Pengelolaan Destinasi Kepariwisataan menyatakan bahwa:

Memang belum ada dari pihak swasta untuk ikut kerjasama dalam pengembangan wisata karangnini.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 5 selaku anggota bidang kepariwisataan menyatakan bahwa:

Belum ada pihak swasta yang bekerjasama.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 6 selaku Kepala Desa Emplak menyatakan bahwa :

Sampai saat ini memang belum ada pihak swasta yang ingin bekerjasama dalam mengembangkan pariwisata Karangnini.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 7 selaku perwakilan Perangkat Desa Emplak menyatakan bahwa :

Belum ada pihak swasta yang berkontribusi dalam pengembangan wisata Karangnini.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 8 selaku perwakilan Tokoh Masyarakat Desa Emplak menyatakan bahwa :

Kami sebagai masyarakat juga belum bisa membantu lebih maksimal dalam strategi pengembangan wisata Karangnini.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa selama ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah cukup berusaha dalam melakukan pengembangan wisata di Karangnini. Oleh karena itu maka perlu dilakukan

pendekatan kepada para pihak swasta yang berkompeten dalam bidang kepariwisataan.

Begitupula dengan hasil observasi terlihat bahwa kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Pariwisata masyarakat berharap wisata karangnini bisa lebih berkembang dengan bantuan berbagai pihak.

Menurut Nugroho (2003:119) “mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai”.

Dengan demikian pengembangan wisata oleh Dinas Pariwisata di Obyek Wisata Karangnini Desa Emplak Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dalam melakukan pendekatan secara bertahap kepada pihak swasta yang siap untuk diajak kerjasama dalam mengembangkan wisata karangnini.

c. Adanya investor dari luar sebagai bentuk dukungan pengembangan wisata

Untuk mengetahui kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran melalui Obyek wisata mengenai adanya investor dari luar sebagai bentuk dukungan pengembangan wisata, berikut ini penulis sajikan hasil wawancara yang antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara dengan informan 1 selaku Kepala Dinas Pariwisata yang menyatakan bahwa :

Kalau untuk investor dari luar, khususnya dari luar Provinsi memang belum ada. Disisi lain obyek wisata karangnini memang belum begitu dikenal oleh banyak wisatawan luar.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan informan 2 selaku Kabid Pengelolaan Destinasi Kepariwisataan menyatakan bahwa:

Untuk saat ini belum ada investor dari luar yang ikut bekerjasama dalam bidang pengembangan wisata karangnini.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 3 selaku Kabid Pembinaan Usaha Kepariwisataan dan Pemasaran menyatakan bahwa:

Disisi lain memang wisata karangnini belum begitu dikenal oleh banyak kalangan wisatawan.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 4 selaku Kasi Pengelolaan Destinasi Kepariwisataan menyatakan bahwa:

Belum ada investor dari luar yang masuk ke wisata karangnini.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 5 selaku anggota bidang kepariwisataan menyatakan bahwa:

Memang cukup sulit untuk mencari investor dari luar dengan keadaan wisata karangnini yang belum dikenal oleh banyak wisatawan.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 6 selaku Kepala Desa Emplak menyatakan bahwa :

Belum ada investor dari luar yang masuk ke obyek wisata karangnini.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 7 selaku perwakilan Perangkat Desa Emplak menyatakan bahwa :

Semua pihak terkait selalu berusaha mencari cara dalam menerapkan strategi pengembangan obyek wisata karangnini.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 8 selaku perwakilan Tokoh Masyarakat Desa Emplak menyatakan bahwa :

Kami sebagai masyarakat belum mengetahui adanya investor dari luar yang ikut kerjasama dalam bidang pengembangan wisata karangnini.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa selama ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah cukup berusaha dalam melakukan pengembangan wisata di Karangnini. Oleh karena itu maka perlu dilakukan pendekatan ke pihak investor dari luar supaya bisa bekerjasama.

Begitupula dengan hasil observasi terlihat bahwa kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Pariwisata masyarakat berharap wisata karangnini bisa lebih berkembang dengan bantuan berbagai pihak.

Menurut Nugroho (2003:119) “mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai”.

Dengan demikian pengembangan wisata oleh Dinas Pariwisata di Obyek Wisata Karangnini Desa Emplak Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dalam strategi untuk pengembangan wisata karangnini bisa lebih difokuskan lagi.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya perencanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok pemandu wisata sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selain itu kurangnya koordinasi yang terjalin antara Dinas Pariwisata dengan Kelompok Pemandu wisata sehingga belum diketahui potensi dan kemampuan kelompok pemandu wisata serta kurangnya mempertimbangkan nilai-nilai dan budaya yang ada dalam mengembangkan objek wisata sehingga kegiatan pembinaan belum dapat mengatasi berbagai permasalahan kelompok pemandu wisata. Selain itu kurangnya pembinaan yang dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan latihan sehingga belum dapat memperbaiki kegiatan-kegiatan yang belum optimal karena kurangnya masukan-masukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kecakapan, keterampilan dan pengetahuan kelompok pemandu wisata.

Adanya hambatan-hambatan dalam strategi pengembangan Wisata Karangnini oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran yang antara lain

kurangnya keikutsertaan daya tarik wisata, serta aksesibilitas dalam menunjang kenyamanan berwisata juga masih kurang maksimal. Selain itu kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh wisata Karangnini dan kurangnya kerjasama dari Lembaga pengelola secara optimal dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata yang mengakibatkan pengembangan di Obyek Wisata Karangnini masih kurang maksimal.

Oleh karena itu untuk mengatasi berbagai hambatan-hambatan tersebut maka telah diupayakan dalam segi daya tarik wisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran dilakukan dengan menyediakan shelter, penataan wisata yang bisa memberikan tontonan kepada wisatawan yang datang serta perencanaan pembangunan mall atau pusat perbelanjaan oleh-oleh. Juga memperbaiki akses jalan menuju lokasi wisata, penataan lahan parkir agar lebih memberikan kenyamanan dan keamanan pengunjung untuk memarkirkan kendaraannya. Serta dilakukan kepada pihak luar yang bisa dijadikan investor wisata untuk ikut bekerjasama dalam strategi pengembangan obyek wisata Karangnini.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang strategi pengembangan Obyek Wisata Karangnini oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

Strategi pengembangan obyek wisata karangnini oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan konsep strategi pengembangan wisata menurut M. Liga Suryadana dalam Putra (2019:18), hal ini dikarenakan dari keempat dimensi yang diteliti belum optimal dalam meningkatkan strategi pengembangan obyek wisata. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya pengawasan kegiatan yang ada di obyek wisata karangnini sehingga tidak menyadari bahwa kenyamanan pengunjung dalam hal keindahan wisata, tempat beristirahat atau shelter serta pusat perbelanjaan oleh-oleh juga adalah hal penting yang selalu dibutuhkan oleh para pengunjung wisata. Selain itu akses jalan yang dirasa masih belum optimal karena masih ada jalan yang rusak menuju lokasi wisata serta lahan parkir yang belum tertata dengan baik. Dari segi lain juga terlihat seperti fasilitas dalam hal ini, penginapa serta kurangnya kerjasama dengan pihak pengelola.

Adanya hambatan-hambatan dalam strategi pengembangan obyek wisata karangnini oleh Dinas Pariwisata Pangandaran yang antara lain kurangnya daya tarik, serta kurang maksimalnya aksesibilitas yang ada di lokasi wisata. Selain itu

kurangnya fasilitas dan kerjasama dengan Lembaga pengelola seperti Dinas Pariwisata.

Oleh karena itu untuk mengatasi berbagai hambatan-hambatan tersebut maka telah diupayakan dalam hal daya tarik wisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran dilakukan dengan meningkatkan penataan lingkungan di sekitaran kawasan wisata serta membuat kegiatan yang bisa dipertontonkan kepada para pengunjung wisata, melakukan perbaikan terhadap akses jalan serta alat telekomunikasi yang menjadi peran penting di tempat wisata. Upaya lainnya yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan fasilitas di kawasan obyek wisata karangnini serta melakukan kerjasama dengan Lembaga pengelola supaya bisa lebih maksimal dalam mengembangkan obyek wisata karangnini.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Pariwisata sebaiknya meningkatkan daya tarik wisata dalam hal ini memberikan sebuah atraksi kegiatan wisata yang bisa dipertontonkan kepada para pengunjung sehingga bisa memberikan kenyamanan dan keindahan kepada wisatawan..
2. Dinas Pariwisata sebaiknya memperhatikan aksesibilitas wisata seperti jalan menuju lokasi yang sudah rusak serta alat telekomunikasi dan transportasi wisata yang bisa memberikan rasa puas kepada para pengunjung wisata.

3. Dinas Pariwisata sebaiknya merencanakan untuk mendirikan penginapan serta penataan lahan parkir dan menyediakan kamar mandi dan wc umum khusus bagi para pengunjung wisata.
4. Dinas Pariwisata bisa bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam mengelola obyek wisata karangnini seperti mendatangkan investor sebagai pendukung dalam pengembangan obyek wisata karangnini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

*Adisasmita, Rahardjo.* (2014). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah.*  
Yogyakarta. Graha Ilmu

Andhika Sutrisno Wibowo (2016) yang berjudul “Analisis Potensi Pengembangan  
Objek Wisata Alam Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara”.

Anismar, Deddy Satria, Muhammad Ali (2018) “Religious Tourism: Concept of  
Community-Based Tourism in Aceh Singkil, Indonesia” Emerald Reach  
Proceedings Series Vol. 1 pp. 283–288.

*Ahmadi, Abu dan Uhbiyati Nur.* 2015. *Ilmu Pendidikan.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

*Arikunto.* 2015. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta: Rineka.  
Cipta.

Barreto, M., dan Giantari, I. G. A. K. (2015). Strategi Pengembangan Objek Wisata  
Air Panas Di Desa Marobo, Kabupaten Bobonaro, Timor Leste. E- Jurnal  
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 4(11), 773–796.

Cox, Tom. 2009. *Stress.* London : The Macmillan Press Ltd.

Dodi Slamet *Riyadi*. 2002, Pengembangan Wilayah : Teori dan. Konsep Dasar,  
Jakarta; Pusat

*Gunn, Clare A.* 1979. Tourism Planning. New York : Crane Russak & Company,.,  
Inc.

Hadi Santoso, Adi Hidayat (2018), yang mengangkat judul “Pengembangan Wisata  
Berbasis Syariah (Halal Tourism)”.

Harold D. *Laswell* Dan Onong Uchjana Effendi. Dinamika Komunikasi. Bandung:  
Remaja. Rosdakarya, 2002. Hendro puspito. Sosiologi Agama. Yogyakarta:  
Kanisius,

*Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa,* 2003, Peran Serta Masyarakat Dalam.  
Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Walhi.

*Ismail, Nawari.* 2015. Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam. Yogyakarta :  
Samudra Biru.

Kent *Lall.* 2005. Dasar-dasar Rekayasa Transportasi. Jilid I. Jakarta: Penerbit  
Erlangga.

*Kotler, Amstrong. 2001. Prinsip-prinsip pemasaran, Edisi keduabelas, Jilid 1.*

Jakarta: Erlangga

*Levinson, Stephen. C. 2015. Pragmatics. Newyork: Cambridge University Press.*

*Marpaung, H. (2002). Pengantar Pariwisata. Bandung: Alfabeta. Cooper, C (1993).*

Tourism principles & Practice.

*McIntyre George, 1993, Sustainable Tourism. Development, Guide for Local.*

Planners.

*Musanef. 2008. Manajemen Kepegawaian Indonesia. Jilid II, Jakarta: PT Gunung.*

*Moleong, L. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT.*

Remaja Rosdakarya.

*Nugroho, Riant, 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan. Evaluasi.*

Jakarta: PT Elek Media Kompotindo.

*Riduwan. 2014. Metode & Teknik Penyusunan Proposal Penelitian. Bandung:*

Alfabeta.

*Suparlan et. All.*,2012. Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks. Indonesia.

Malang: Universitas Negeri Malang.

*Supranto.* (2012). Metode Riset, Cetakan Kedua. Jakarta: Rineka Cipta.

*Sugiyono.* (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung :

Alfabeta.

*Suryadana, M Liga & Octavia, Vanny.* 2015. Pengantar Pemasaran Pariwisata.

Bandung : Alfabeta. Marpaung, Happy. 2002.

*Soeharto.* (2015). Evaluasi pelaksanaan Praktik Kerja.

Soekanto,Soerjono. 2010. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Rajawali Pers.

*Soekanto,Soerjono.* 2015. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Rajawali Pers.

Pengkajian Kebijakan. Teknologi Pengembangan Wilayah BBPT. Fidel

Miro.

Tjiptono. 2014. Service, Quality & Satisfaction. Edisi 3. Yogyakarta: Penerbit Andi

**Sumber Jurnal/Artikel :**

*Barreto, M., Giantari, I.G.A. 2015. "Strategi Pengembangan Objek Wisata Air.*

*Panas Di Desa Marobo, Kabupaten Bobonaro, Timor Leste".*

Maulida, L. S. (2019). PERAN PENGELOLA AGROWISATA DALAM  
MENGENTASKAN KEMISKINAN MASYARAKAT  
PEDESAAN

(Studi kasus di Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten  
Bandung Barat). *Comm-Edu (Community Education Journal)*.

*Sastrayuda, Gumelar, S. (2010). Hand out mata kuliah Concept Resort  
And. Leisure, Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort  
and. Leisure. Bandung.*

Wardana (2017) "Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata Di  
Kabupaten Pesisir Barat".

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang  
kepariwisataan. Induk Pembangunan Kepariwisata  
Daerah Tahun 2018-2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana